

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI  
AUDITOR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN  
PEMKAB/PEMKO PROPINSI SUMATERA BARAT PADA  
TAHUN 2006 DAN 2007**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan  
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

**SYANTI ERNA AYU**  
**06096046**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**





No. Alumni Universitas	<b>SYANTI ERNA AYU</b>	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------------------	---------------------

a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang/10 Januari 1985 b). Nama Orangtua: Syahril dan Risna c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e). No. BP: 06 096 046 f). Tanggal Lulus: 24 Juli 2009 g). Peringkat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3,73 i). Lama Studi: 32 Bulan j). Alamat Orangtua: Duku Kenagarian Duku Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDITOR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMKAB/PEMKO PROPINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2006 DAN 2007**

*Tugas Akhir D IV Akuntansi Pemerintahan Oleh: Syanti Erna Ayu  
Pembimbing 1. Irda Rosita, SE. MEcSt, Ak 2. Nurul Fauzi, SE. MM, Ak*

**ABSTRAK**

Salah satu cara untuk mengetahui laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dilakukan dengan melakukan audit. Audit pada sektor publik dilakukan oleh BPK RI. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang mengemukakan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemda. Dari opini tersebut ditelusuri faktor-faktor apa yang mempengaruhi auditor dalam mengemukakan pendapatnya. Selama tahun 2006 dan 2007, BPK RI mengeluarkan *qualified opinion* dan *disclaimer opinion* pada semua kabupaten dan kota Propinsi Sumatera Barat. Dari hasil analisa faktor yang mempengaruhi opini BPK terhadap LHP tahun 2006 dan 2007 adalah ruang lingkup auditor yang dibatasi, laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten, ketidakpastian material yang mempengaruhi laporan keuangan, kurangnya komitmen pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Selain dari faktor tersebut, ada faktor lain yang juga mempengaruhi opini auditor yaitu lemahnya sistem pengendalian internal di pemda.

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Dedy Djefris, SE. M.Ak.Ak	Wiwik Andriani, SE. Ak	Novrina Chandra, SE.MM.Ak	Irda Rosita, SE. MEcSt.Ak

Mengetahui:  
Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE.MM,Ak  
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan nomor Alumnus

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma telah terjadi dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya tripartite perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara) yang kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dilanjutkan dengan adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) mulai tahun 2006 telah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Hal ini memang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2007, BPK sebagai aparat pemeriksa fungsional telah melakukan pemeriksaan pemerintah daerah secara menyeluruh.

Perkembangan paradigma pemerintahan di berbagai negara sedang dalam proses pergeseran dari *ruling government* menuju ke *governance* dan penciptaan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkeadilan. Hal ini telah menimbulkan kesadaran setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk

senantiasa tanggap terhadap tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan berakuntabilitas.

Menurut Bastian (2007), pemeriksaan atau auditing merupakan proses investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanisme pemeriksaan/audit merupakan sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau instansi pengelola aktiva negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen ini bertujuan menyatakan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang menyatakan opini auditor, atau dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas adalah penting untuk memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah. Agar pemeriksaan menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis pemerintah daerah juga harus memahami bagaimana cara mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan audit yang akan dilakukan oleh auditor.

Setelah melakukan pemeriksaan keuangan, BPK akan mengeluarkan opini tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Opini yang dikeluarkan oleh auditor (Bastian, 2007) terdiri dari pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adserve opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Opini yang dikeluarkan tersebut tidak lepas dari berbagai faktor yang mendasari pendapat auditor. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh auditor terhadap kabupaten dan kota yang

## BAB LIMA

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat pada umumnya mendapatkan 2 (dua) opini dari BPK RI. Kedua opini tersebut adalah opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Dari kedua opini tersebut ditemukan beberapa faktor yang mendasari BPK mengeluarkan opini itu.

Setelah dilakukan analisa, penulis menemukan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi opini auditor, yaitu:

1. Ruang lingkup auditor yang dibatasi
2. Laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
3. Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten
4. Adanya ketidakpastian material yang mempengaruhi posisi keuangan
5. Kurangnya komitmen penda dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK

Temuan ini sejalan dengan yang pernah diungkapkan oleh Usmansyah dan Kuntadi. Selain 5 (lima) faktor diatas, ada faktor lain yang juga penting terhadap opini auditor, yaitu lemahnya sistem pengendalian internal. Kondisi umum yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal adalah:

1. Kurang/tidak adanya bukti-bukti pertanggungjawaban dari suatu transaksi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- \_\_\_\_\_. *The Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association*. (2008).
- Bastian, Indra. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- BPS. (2008). *Analisa Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat, 2007*. Padang: BPS
- \_\_\_\_\_. *Sumatera Barat dalam Angka Tahun, 2008*. Padang: BPS
- Bachtiar, Yusrial. (2009). *Disclaimer: So What?*.
- Budhiarta, Ketut. (2008). *Menelusuri Opini Auditor Independen atas LKPD Pemerintah Propinsi Bali*.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Irawan, Prasetya. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2006). *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*. Jakarta: Salemba Empat
- Kuntadi, Crish. (2008). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian*.
- Mahsun M, Firma Sulistyowati. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008)
- Usmansyah. (2009). *Mengenal Opini Auditor*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006)